

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, M., & Binarsa, D. B. Etika profesi dan aspek pidana dalam pelayanan kesehatan: Harmonisasi menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2024.
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Firmanto, T., S. Sufiarina, F. Reumi, dan I. N. S. Saleh. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hasibuan, Malayu S. P. *Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Jaelani. *Teori Organisasi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021.
- Kadarman, H. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Konsil Kesehatan Indonesia. *Profil Konsil Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi*. 2023.
- Kast, Fremont E., dan James E. Rosenzweig. *Organisasi dan Manajemen*. Edisi ke-4. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Koontz, Henry, dan Cyril O'Donnell. *Principles of Management*. Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Marbun, S. F., dan Moh. Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2016.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sudarmanto, A. M. Pengaturan etik dan disiplin profesi tenaga medis di Indonesia pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Universitas Katolik Soegijapranata. 2024.

Sudarmanto, A. M., Nurmardiansyah, E., Nugroho, H. P., & Siregar, R. A. Hubungan penegakan disiplin profesi dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Negara Hukum. 2024.

Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2023.

Syahrum, M. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV Dotplus Publisher, 2022.

Tahir, R., et al. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu, 2013.

Terry, George R., dan Leslie W. Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Erlangga, 1995.

Van Wijk, H. D., dan Willem Konijnenbelt. *Hoofdstukken van Administratief Recht*. 's-Gravenhage: Vuga, 1995.

Peraturan Perundang-Undangan

Persatuan Dokter Gigi Indonesia. (2025). *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDGI hasil Kongres Nasional XXVIII di Surabaya*. Pengurus Besar PDGI.

Persatuan Dokter Gigi Indonesia. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDGI*. Jakarta, 2025.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia. “Susunan Pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia Periode 2024–2028.”

Ridwan HR. (2016). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.

Ridwan HR. (2020). *Hukum administrasi negara* (Ed. Rev.). RajaGrafindo Persada.

Sekararum, M., Huda, M. K., & Pramono, B. (2024). Ratio legis pengaturan surat tanda registrasi seumur hidup bagi tenaga medis. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 4(2), 145–159.

Sekararum, Marissa, Mokhammad Khoirul Huda, dan Budi Pramono. 2024. “Ratio Legis Pengaturan Surat Tanda Registrasi Seumur Hidup bagi Tenaga Medis.” *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan* 4, no. 2.

Shaumy, R. V., Tri Umiana Soleha, dan Citra Y. Pardilawati. 2025. “The Indonesian Health Legal System Provides Legal Protection for Pharmacists.” *NHS Journal* 5, no. 2.

Siregar, Rospita Adelina, et al. 2024. “Majelis Disiplin Profesi sebagai *Primum Remedium* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.” *Jurnal Hukum To-Ra* 10, no. 3.

Sudarmanto, A. M., Nurmardiansyah, E., Nugroho, H. P., & Siregar, R. A. (2024). Hubungan penegakan disiplin profesi dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Negara Hukum*, 15(1), 67–82.

Sudarmanto, Alif Muhammad, et al. 2025. “Comparison of Regulations on Medical Professional Discipline Enforcement Institutions.” *Media Iuris* 8, no. 1.

Sulaksono, B., Pramono, B., & Hoediono, C. R. (2025). Reformulasi kedudukan organisasi profesi Persatuan Dokter Gigi Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(3), 1677–1690.

Sulaksono, Budi Pramono, dan Charissa Roderica Hoediono. 2025. “Reformulasi Kedudukan Organisasi Profesi Persatuan Dokter Gigi Indonesia dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.” *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 3: 1677–1690.

Susila, Muh Endriya. 2015. "Medical Law in Indonesia: Its History and Development." *Jurnal Hukum PRIORIS* 5, no. 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Hasil Penelitian

Abdullah, M., & Binarsa, D. B. (2024). *Etika profesi dan aspek pidana dalam pelayanan kesehatan: Harmonisasi menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Andriani Ratna Dewi, Dian, dan Farras Sheika Audiary. 2023. "Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Medis dalam Menjalankan Praktik Kedokteran." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 82.

Asshiddiqie, J. (2014). *Peradilan etik dan etika konstitusi*. Sinar Grafika.

Darma. 2025. "Health Criminal Law as an Instrument to Protect Human Rights: A Comparative Study of Indonesia and Algeria." *Jurnal Suara Hukum* 7, no. 1.

Fauzi Rahman, Margaretha, dan Asep Sapsudin. 2025. "Legal Issues in Limiting Authority of Health Professional Organizations After Indonesia's 2023 Health Law Enactment." *Research Horizon* 5, no. 4: 1503–1504.

Febriani, Ade, et al. 2024. *Buku Ajar Etika dan Hukum Kebidanan*. Tahta Media Group.

Fitira, A. (2025). Kedudukan rekomendasi majelis disiplin profesi sebagai quasi-penyelidikan dalam sengketa medik di Indonesia. *IUSTUM Law Journal*, 32(3), 412–428.

Fitira, Annisa. 2025. "Kedudukan Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi sebagai Quasi-Penyelidikan dalam Sengketa Medik di Indonesia." *IUSTUM Law Journal* 32, no. 3.

Gunawan Widjaja. 2025. "Transformasi Penegakan Disiplin Profesi Medis: Dari MKDKI ke Majelis Disiplin Profesi sebagai Screening System Dugaan Malpraktik." *Journal of Community Dedication* 4, no. 4.

Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Herlina, M. 2024. “Konsep Penyusunan Norma Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan Guna Mencegah Multitafsir dalam Penegakan Hukum di Indonesia.”

Hukumonline. “Organisasi Profesi.” Diakses 29 November 2025.

<https://www.hukumonline.com/kamus/o/organisasi-profesi>

Indra Triana, Yeni Triana, dan Lilia Sarifatamin Damanik. 2024. “Kewenangan Dokter Gigi Umum atas Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.” *Jurnal Kesehatan Tambusai* 5, no. 1.

Indroharto. (2004). *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I*. Pustaka Sinar Harapan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. “Pengertian Pengawasan.” Diakses 10 Desember 2025.

<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id>

Kompas.com. “UU Kesehatan Baru: Konsil Berada di Bawah Presiden dan Bersifat Independen.” 2023.

Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan. “Majelis Disiplin Profesi: Ke Mana Korban Dapat Mengadu Saat Terjadi Malapraktik?”

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Berita Acara Sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Perkara Nomor 111/PUU-XXII/2024. Jakarta, 2024

Marbun, S. F., & Mahfud MD, M. (2016). *Pokok-pokok hukum administrasi negara*. Liberty.

Muhafid, et al. 2025. “Transformasi UU No. 17 Tahun 2023 dalam Mendorong Sistem Kesehatan yang Inklusif dan Berkelanjutan.” *Jurnal Inovasi dan Hasil-Hasil Penelitian* 5, no. 6.

Muhammad, A. K. (2015). *Etika profesi hukum*. Citra Aditya Bakti.

Nadeak, J. O. H. (2024). Penerapan disiplin profesi sebagai instrumen penegakan hukum pidana kesehatan berbasis keadilan prosedural. *Prosiding Kongres ke-6 Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, 88–101.

Nadeak, Jasmen Ojak Haholongan. 2024. “Penerapan Disiplin Profesi sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Berbasis Keadilan Prosedural.” Dalam *Prosiding Kongres ke-6 Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, Palembang.

Nasser, M. 2018. “Penegakan Disiplin Kedokteran oleh MKDKI.” *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan* 11, no. 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Widjaja, G. (2025). Transformasi penegakan disiplin profesi medis: Dari MKDKI ke Majelis Disiplin Profesi sebagai screening system dugaan malpraktik. *Journal of Community Dedication*, 4(4), 312–325.

